BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan). Zakat berarti kesuburan, sebab akan tumbuh suburnya pahala. Dari sisi muzaki jelas bahwa dengan zakat muzaki akan menuai kesuburan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan dari sisi mustahik, kesuburan berarti tumbuh suburnya usaha dan ekonomi. Sehingga mustahik menjadi semakin berdaya kehidupannya. Ia tidak senantiasa tergantung pada pemberian terus-menerus.¹ Sedangkan menurut arti syara', Al-Mawardi mendefinisikan zakat yaitu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.²

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yaitu terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 190.

²Ibid., 192.

*pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*³

3. Mustahik (orang yang menerima zakat)

Allah SWT. telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan yang jelaskan dalam Q.S. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

a. Kelompok Fakir dan Miskin

Nabi SAW bersabda:

“orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi atau satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak pergi meminta-minta pada orang lain.”(HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Terdapat indikator yang ditekankan oleh para imam mazhab :

- 1) Indikator fakir: ketidak mampuan pemenuhan kebutuhan materi.
- 2) Indikator miskin: ketidak mampuan dalam mencari nafkah atau punya penghasilan namun tidak mencukupi.⁵

b. Kelompok Amil Zakat

³Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 18.

⁴QS. At-Taubah (9): 60.

⁵Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*(Jakarta: Kencana, 2006), 183.

Dalam optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa. Semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% dari harta yang terkumpul.⁶

c. Kelompok *Riqab*

Banyak penafsiran mengenai *riqab* yaitu: mulai dari budak belian, bangsa yang terjajah, dan karyawan/buruh yang berporos kepada adanya kekuasaan pihak lain, dimana yang satu surplus dan yang satu defisit. Pengertian *riqab* harus disesuaikan dari zaman ke zaman, karena substansi akan adanya orang atau sekelompok manusia yang berada di bawah kekuasaan orang atau kelompok orang lain akan selalu ada dari zaman ke zaman, hanya saja dengan kondisi yang berbeda-beda.

d. Kelompok Mualaf

Dalam kajian fikih klasik, mualaf diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Mualaf muslim: orang yang sudah masuk Islam namun niat dan imannya masih lemah.

⁶Ibid., 192.

- 2) Orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya.
- 3) Mualaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir.
- 4) Mualaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.

e. Kelompok *Gharimin*

Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa *gharim* terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya.
- 2) Kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

f. Kelompok *Fi Sabilillah*

Menurut madzhab Syafi'i, *sabilillah* adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap (gaji) dari pemerintah. Namun, untuk saat sekarang *fi sabilillah* lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad. Perjuangan seorang muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah.

g. Kelompok Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama' Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dan ia kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kehidupan ekonominya berkecukupan.⁷

Dalam hal ini peneliti menfokuskan mustahik pada para dhuafa. Dhuafa menurut KBBI adalah orang-orang yang lemah baik dari segi ekonomi dan sebagainya.⁸ Dhuafa adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan ini bukanlah kebutuhan dasar yaitu konsumsi, namun lebih kepada kebutuhan sekunder yang menunjang kebutuhan primer. Di dalam al-Qur'an, dhuafa tidak disebutkan dalam kelompok delapan *ashnaf* namun mendekati pada pengertian fakir dan miskin. Untuk mustahik fakir dan miskin terdapat indikator yang ditekankan oleh para imam mazhab :

- 1) Indikator fakir: ketidak mampuan pemenuhan kebutuhan materi.
- 2) Indikator miskin: ketidak mampuan dalam mencari nafkah atau punya penghasilan namun tidak mencukupi.⁹

Menurut Imam al-Syafi'i, Hanbali, dan Wahbah al-Zuhayli fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya

⁷Ibid., 202-212.

⁸<http://kbbi.web.id/duafa>, diakses tanggal 20 Januari 2018

⁹Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 183.

hanya mampu untuk memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhan sehari-harinya. Orang fakir lebih sengsara daripada orang miskin. Allah menyebut kata *al-fakir* terlebih dahulu daripada *al-miskin* karena Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul berikutnya.¹⁰ Allah berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ
هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.”¹¹

Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu untuk bekerja di laut, dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Syafi’i, bahwa orang miskin keadaannya lebih baik daripada orang fakir, karena orang miskin masih memiliki modal untuk mencari rezeki.

Dilihat dari pengertian fakir dan miskin yang disampaikan di atas, dhuafa termasuk kategori delapan *ashnaf* di dalam al-Qur’an yaitu miskin. Dhuafa merupakan orang yang lemah dalam ekonomi namun masih kuat untuk bekerja sehingga perlu diberi zakat untuk usaha produktif. Berbeda dengan orang fakir yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Orang fakir lebih cocok untuk diberi zakat untuk keperluan konsumtif karena kebutuhan primernya masih belum bisa terpenuhi. Pemberian zakat untuk usaha produktif kepada para dhuafa dipilih oleh Yayasan Nurul

¹⁰Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91-92.

¹¹QS. Al-Kahfi (18): 79.

Hayat karena bisa meningkatkan pendapatan dari dhuafa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sesuai dengan semboyan dari Nurul Hayat yaitu “mustahik to muzaki”.

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan, dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Hikmah zakat yaitu:

- a. Memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
- b. Dapat membantu para fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
- c. Dapat membersihkan harta yang diperoleh dan menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah.
- d. Dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.¹²

B. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan

¹²Sudirman, *Zakat.*, 53.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Jadi, pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.¹³

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

2. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam,

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 189.

dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁴ Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelola zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.¹⁵

3. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Zakat

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain :

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat

¹⁴Nur Chikmah, "Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang" (Skripsi Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2005), 42-45.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2013), 152-155.

harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.¹⁶

Adapun sifat menurut Widodo, bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga yaitu :

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat

4. Pemanfaatan Dana Zakat

Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisonal, yaitu zakat dibagi-bagikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.
- b. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.

¹⁶Nur Chikmah, "Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang" (Skripsi Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2005), 30-31.

- c. Pendayagunaan yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
- d. Pendayagunaan yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁷

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Widodo pemberdayaan hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat, peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar partisipasi dan kebutuhannya yang bertumpu pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Jadi, memberdayakan berarti meningkatkan kemampuan individu dengan memanfaatkan dana zakat sebagai instrumen pengembangan ekonomi secara adil dan merata.

Adapun prosedur pemberdayaan zakat telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan, yakni :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf* khususnya fakir miskin;

¹⁷Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 153.

¹⁸Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), 290.

- b. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, dalam pasal 29 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Mengadakan evaluasi.¹⁹

2. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat) Nana Mintarti, ada enam langkah yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat yang terarah dan tepat sasaran, yaitu:

- a. Melakukan analisis sosial, ekonomis, teknis, dan kelembagaan sebagai awal untuk identifikasi permasalahan. Langkah ini perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat untuk mengetahui kebutuhan, potensi, peluang, dan permasalahan yang ada di masyarakat. Terdapat metode yang digunakan, diantaranya yaitu: a) metode dan teknik Kajian Pedesaan Secara Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*); b) metode dan

¹⁹Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 25.

teknik Kajian Keadaan Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal*).

- b. Melakukan analisis pihak terkait (*stakeholder analysis*). Langkah ini bertujuan untuk menajaki kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi para pihak terkait (*stakeholder*) yang dapat dipengaruhi/berpengaruh pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Membuat rancangan dan desain program yang logis dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran serta wilayah sasaran.
- d. Melakukan identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan. Meliputi identifikasi pelaksanaan program beserta pembagian kewenangan yang mereka miliki. Perlu ada identifikasi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan spesifik diantara para pengelola program sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, siapa melakukan apa, dan kapan harus selesai serta bagaimana dilakukan serta berapa kebutuhan input.
- e. Implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Lembaga pelaksana program harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi bersama masyarakat mengenai kepastian pelaksanaan program bagi berbagai pihak terkait, serta pelatihan bagi para pendamping program.

- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler.

Langkah ini memiliki peranan penting dalam mendukung terlaksananya program pemberdayaan masyarakat secara terencana dan

tepat sasaran. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan kegiatan program, permasalahan, tingkat pencapaian hasil-hasil yang ditargetkan, memotivasi orang-orang yang terlibat dalam program untuk menjaga dinamika kerja, mendokumentasikan informasi, dan mendokumentasikan bahan untuk audit.²⁰

D. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemandirian juga diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan mengatur hidup sendiri tanpa ketergantungan berlebihan terhadap orang lain. Kemandirian tidak dapat selesai pada satu tahap kehidupan, melainkan akan terus berkembang di dalam diri individu.²¹

Kemandirian merupakan kemampuan yang menggabungkan antara mental dan fisik untuk memahami kelemahan dan kekuatan sendiri, kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan dan kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan.²²

Beni Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki lima aspek, yaitu:

1. Bebas hutang konsumtif

²⁰Ridwan, *Manajemen.*, 172-173.

²¹Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 1, (Februari, 2010), 23.

²²Hamzah, "Pemberdayaan Mustahik Zakat Menuju Kemandirian Usaha, Kasus di Kabupaten Bogor Jawa Barat"(Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2015), 25.

Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Misalnya, untuk memulai usaha, untuk membeli tanah, untuk sekolah dan sebagainya. Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah penghasilan, misalnya membeli hp atau mobil untuk mengikuti gaya hidup.

2. Memiliki keyakinan dalam bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan berarti tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya merosot atau sedang sepi. Dia akan terus mencari cara bagaimana menimbun jurang lalu membangun sebuah bukit. Dia akan selalu memantau bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.

3. Memiliki investasi

Investasi adalah menanamkan modal dengan harapan nantinya akan tumbuh, modal bisa apapun termasuk uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki investasi dinilai memiliki pandangan yang jauh ke depan, yaitu melihat bagaimana hasil akhir dari proses suatu usaha dari bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, yaitu membuat pandangan seorang investor semakin tajam.

4. Mampu mengelola arus kas uang (*cash flow*)

Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran/pembelanjaan. Sebuah arus kas dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran seseorang lebih besar daripada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.

5. Siap mental terhadap gangguan finansial

Kesiapan fisik seseorang dalam bisnis seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau asuransi adalah penting. Namun aspek mental terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka yang memiliki mental bangkit dari setiap jatuh akan membuat seseorang lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya, karena seperti krisis atau ditinggal seseorang yang dicintai terbukti mampu menjauhkan bisnis yang sudah kuat.²³

²³Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*(Jakarta: Averroes Press, 2006), 10-11.